

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SDN.
8. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
9. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan

mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Batu.

10. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.
12. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
13. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan golongan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.

- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kepada Peserta Didik Baru dengan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (luring) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali; dan
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 6

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Empat Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Bagian Kelima Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi; dan
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Daftar zonasi lembaga penyelenggara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

Pasal 11

Pagu SDN Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing Satuan Pendidikan dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 15

Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme luar jejaring (luring) tidak dipungut biaya.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Situs PPDB dengan alamat: **www.batu.siap-ppdb.com**

BAB IV SANKSI

Pasal 17

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Mei 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 39/E

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

I. SEKOLAH PELAKSANA PPDB

Sekolah peserta PPDB 2019 Kota Batu adalah seluruh sekolah SD Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Sekolah PPDB Sekolah Dasar Negeri 2019 Kota Batu adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
KECAMATAN BATU			
1		SDN Sidomulyo 01	JL. Bukit Berbunga 70 Batu
2		SDN Sidomulyo 02	JL. Cemara Kipas 120 Batu
3		SDN Sidomulyo 03	JL. Mawar Putih 141 Batu
4		SDN Sumberejo 01	JL. Indragiri 79
5		SDN Sumberejo 02	JL. Indragiri 81
6		SDN Sumberejo 03	JL. Metro 22
7		SDN Sisir 01	JL. Arjuno 40 D
8		SDN Sisir 02	JL. Arjuno 40 D
9		SDN Sisir 03	JL. Imam Bonjol III/9
10		SDN Sisir 04	JL. Imam Bonjol III/9
11		SDN Sisir 05	JL. Arjuno 40 C
12		SDN Sisir 06	JL. Imam Bonjol III/7
13		SDN Ngaglik 01	JL. Abdul Rahan 23
14		SDN Ngaglik 02	JL. Ikhwan Hadi 41
15		SDN Ngaglik 03	JL. Abdul Gani IV / 29
16		SDN Ngaglik 04	JL. Darsono 27
17		SDN Pesanggrahan 01	JL. Suropati 123
18		SDN Pesanggrahan 02	JL. Cempaka Atas 1
19		SDN Songgokerto 01	JL. Trunojoyo 24
20		SDN Songgokerto 02	JL. Teratai 23
21		SDN Songgokerto 03	JL. Arum Dalu 65
22		SDN Temas 01	JL. Patimura 23
23		SDN Temas 02	JL. Wukir VIII/ 38
24		SDN Oro-Oro Ombo 01	JL. Raya Oro-Oro Ombo
25		SDN Oro-Oro Ombo 02	JL. Raya Oro-Oro Ombo 36
26		SDN Oro-Oro Ombo 03	JL. Raya TVRI Dresel
KECAMATAN BUMIAJI			
27		SDN Tulungrejo 01	JL. Raya Tulungrejo
28		SDN Tulungrejo 02	JL. Raya Tulungrejo
29		SDN Tulungrejo 03	JL. Raya Sumber Brantas 116
30		SDN Tulungrejo 04	JL. Raya Junggo Gabes

31		SDN Tulungrejo 05	Ds. Kekep Tulungrejo
32		SDN Sumbergondo 01	JL. Raya Sumbergondo 2
33		SDN Sumbergondo 02	JL. Tegalsari
34		SDN Punten 01	JL. Raya Punten 24
35		SDN Punten 02	JL. Raya Punten 24
36		SDN Bulukerto 01	JL. Kenanga
37		SDN BULUKERTO 02	JL. Imam Sujono 67
38		SDN Bulukerto 03	JL. Raya Cangar
39		SDN Gunungsari 01	JL. Brumbung 73
40		SDN Gunungsari 02	JL. Pager Gunung
41		SDN Gunungsari 03	JL. Kandangan
42		SDN Gunungsari 04	JL. argomulyo 20 Brau
43		SDN Bumiaji 01	JL. Abu Ghonaim
44		SDN Bumiaji 02	JL. Kastubi 1
45		SDN Pandanrejo 01	JL. Raya Pandarejo 1
46		SDN Pandanrejo 02	JL. Raya Pandanrejo 122
47		SDN Giripurno 01	JL. Raya Giripurno 221
48		SDN Giripurno 02	JL. Dukuh Krajan
49		SDN Giripurno 03	Ds. Cembo
KECAMATAN JUNREJO			
50		SDN Beji 01	JL. Raya Beji No.42
51		SDN Beji 02	JL. Sarimun Krajan
52		SDN Torongrejo 01	JL. Wukir 37 Torongrejo
53		SDN Torongrejo 02	JL. Wukir 37 Torongrejo
54		SDN Torongrejo 03	JL. Aji Mustofa Torongrejo
55		SDN Mojorejo 01	JL. Raya Mojorejo 86
56		SDN Mojorejo 02	JL. Raya Mojorejo 23
57		SDN Junrejo 01	JL. Hasanudin 57 Junrejo
58		SDN Junrejo 02	JL. Raya Junrejo 6
59		SDN Tlekung 01	JL. Raya Tlekung 15
60		SDN Tlekung 02	JL. Raya Tlekung 15
61		SDN Dadaprejo 01	JL. Dadaprejo 56
62		SDN Dadaprejo 02	JL. Dadaprejo
63		SDN Pendem 01	JL. Raya Pendem 9
64		SDN Pendem 02	JL. Raya Pendem 134

II. JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
A. PENUGASAN ORANG TUA/WALI		
1	Pendaftaran	27 – 28 Mei 2019
2	Seleksi dan Pengolahan	27 – 28 Mei 2019
3	Pengumuman	29 Mei 2019
4	Daftar Ulang	29 Mei 2019
B. JALUR ZONASI		
5	Pendaftaran	17, 18, dan 19 Juni 2019
6	Seleksi dan Pengolahan	17, 18, dan 19 Juni 2019
7	Pengumuman	21 Juni 2019

8	Daftar Ulang	24 – 25 Juni 2019
9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2019
10	Perkiraan Pra Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	12 – Juli 2019
11	Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	15, 16, 17 Juli 2019

III. DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN
1	SDN Sidomulyo 01	1. Sidomulyo 2. Gunungsari 3. Punten 4. Bulukerto
2	SDN Sidomulyo 02	1. Sidomulyo 2. Gunungsari 3. Punten 4. Bulukerto
3	SDN Sidomulyo 03	1. Sidomulyo 2. Gunungsari 3. Punten 4. Bulukerto
4	SDN Sumberejo 01	1. Sumberejo 2. Sidomulyo 3. Pesanggrahan 4. Gunungsari
5	SDN Sumberejo 02	1. Sumberejo 2. Sidomulyo 3. Pesanggrahan 4. Gunungsari
6	SDN Sumberejo 03	1. Sumberejo 2. Sidomulyo 3. Pesanggrahan 4. Gunungsari
7	SDN Sisir 01	1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik
8	SDN Sisir 02	1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik
9	SDN Sisir 03	1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik
10	SDN Sisir 04	1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik
11	SDN Sisir 05	1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik

12	SDN Sisir 06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisir 2. Temas 3. Ngaglik
13	SDN Ngaglik 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngaglik 2. Sisir 3. Pesanggrahan
14	SDN Ngaglik 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngaglik 2. Sisir 3. Pesanggrahan
15	SDN Ngaglik 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngaglik 2. Sisir 3. Pesanggrahan
16	SDN Ngaglik 04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngaglik 2. Sisir 3. Pesanggrahan
17	SDN Pesanggrahan 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesanggrahan 2. Ngaglik 3. Songgokerto
18	SDN Pesanggrahan 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesanggrahan 2. Ngaglik 3. Songgokerto
19	SDN Songgokerto 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Songgokerto 2. Pesanggrahan
20	SDN Songgokerto 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Songgokerto 2. Pesanggrahan
21	SDN Songgokerto 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Songgokerto 2. Pesanggrahan
22	SDN Temas 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temas 2. Torongrejo 3. Beji
23	SDN Temas 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temas 2. Torongrejo 3. Beji
24	SDN Oro-Oro Ombo 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oro-oro Ombo 2. Temas 3. Beji 4. Tlekung 5. Sisir
25	SDN Oro-Oro Ombo 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oro-oro Ombo 2. Temas 3. Beji 4. Tlekung 5. Sisir
26	SDN Oro-Oro Ombo 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oro-oro Ombo 2. Temas 3. Beji 4. Tlekung 5. Sisir

27	SDN Tulungrejo 01	1. Tulungrejo 2. Punten 3. Sumbergondo
28	SDN Tulungrejo 02	1. Tulungrejo 2. Punten 3. Sumbergondo
29	SDN Tulungrejo 03	Sumberbrantas
30	SDN Tulungrejo 04	1. Tulungrejo 2. Punten 3. Sumbergondo
31	SDN Tulungrejo 05	1. Tulungrejo 2. Punten 3. Sumbergondo
32	SDN Sumbergondo 01	1. Sumbergondo 2. Tulungrejo 3. Punten 4. Bulukerto
33	SDN Sumbergondo 02	1. Sumbergondo 2. Tulungrejo 3. Punten 4. Bulukerto
34	SDN Punten 01	1. Punten 2. Bulukerto 3. Sidomulyo
35	SDN Punten 02	1. Punten 2. Bulukerto 3. Sidomulyo
36	SDN Bulukerto 01	1. Bulukerto 2. Punten 3. Sidomulyo
37	SDN Bulukerto 02	1. Bulukerto 2. Punten 3. Sidomulyo
38	SDN Bulukerto 03	1. Bulukerto 2. Punten 3. Sidomulyo
39	SDN Gunungsari 01	1. Gunungsari 2. Sumberejo 3. Sidomulyo 4. Punten
40	SDN Gunungsari 02	1. Gunungsari 2. Sumberejo 3. Sidomulyo 4. Punten
41	SDN Gunungsari 03	1. Gunungsari 2. Sumberejo 3. Sidomulyo 4. Punten

42	SDN Gunungsari 04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunungsari 2. Sumberejo 3. Sidomulyo 4. Punten
43	SDN Bumiaji 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumiaji 2. Pandanrejo 3. Bulukerto
44	SDN Bumiaji 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumiaji 2. Pandanrejo 3. Bulukerto
45	SDN Pandanrejo 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandanrejo 2. Bumiaji 3. Giripurno
46	SDN Pandanrejo 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandanrejo 2. Bumiaji 3. Giripurno
47	SDN Giripurno 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giripurno 2. Pandanrejo
48	SDN Giripurno 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giripurno 2. Pandanrejo
49	SDN Giripurno 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giripurno 2. Pandanrejo
50	SDN Beji 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beji 2. Oro-oro Ombo 3. Temas 4. Mojorejo
51	SDN Beji 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beji 2. Oro-oro Ombo 3. Temas 4. Mojorejo
52	SDN Torongrejo 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Torongrejo 2. Beji 3. Temas 4. Pendem
53	SDN Torongrejo 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Torongrejo 2. Beji 3. Temas 4. Pendem
54	SDN Torongrejo 03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Torongrejo 2. Beji 3. Temas 4. Pendem
55	SDN Mojorejo 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mojorejo 2. Dadaprejo 3. Junrejo 4. Beji

56	SDN Mojorejo 02	1. Mojorejo 2. Dadaprejo 3. Junrejo 4. Beji
57	SDN Junrejo 01	1. Junrejo 2. Mojorejo 3. Tlekung
58	SDN Junrejo 02	1. Junrejo 2. Mojorejo 3. Tlekung
59	SDN Tlekung 01	1. Tlekung 2. Junrejo 3. Oro-Oro Ombo
60	SDN Tlekung 02	1. Tlekung 2. Junrejo 3. Oro-Oro Ombo
61	SDN Dadaprejo 01	1. Dadaprejo 2. Pendem 3. Mojorejo 4. Junrejo
62	SDN Dadaprejo 02	1. Dadaprejo 2. Pendem 3. Mojorejo 4. Junrejo
63	SDN Pendem 01	1. Pendem 2. Dadaprejo 3. Mojorejo
64	SDN Pendem 02	1. Pendem 2. Dadaprejo 3. Mojorejo

IV. PAGU SD NEGERI KOTA BATU

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLH ROMBEL	PAGU	JUMLAH JALUR ZONASI	JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI
KECAMATAN BATU					
1	SDN Sidomulyo 01	1	28	25	3
2	SDN Sidomulyo 02	1	28	25	3
3	SDN Sidomulyo 03	2	56	50	6
4	SDN Sumberejo 01	1	28	25	3
5	SDN Sumberejo 02	2	56	50	6
6	SDN Sumberejo 03	1	28	25	3
7	SDN Sisir 01	2	56	50	6
8	SDN Sisir 02	1	28	25	3
9	SDN Sisir 03	1	28	25	3
10	SDN Sisir 04	1	28	25	3
11	SDN Sisir 05	2	56	50	6

12	SDN Sisir 06	1	28	25	3
13	SDN Ngaglik 01	3	84	75	9
14	SDN Ngaglik 02	2	56	50	6
15	SDN Ngaglik 03	1	28	25	3
16	SDN Ngaglik 04	1	28	25	3
17	SDN Pesanggrahan 01	1	28	25	3
18	SDN Pesanggrahan 02	1	28	25	3
19	SDN Songgokerto 01	1	28	25	3
20	SDN Songgokerto 02	1	28	25	3
21	SDN Songgokerto 03	1	28	25	3
22	SDN Temas 01	3	84	75	9
23	SDN Temas 02	1	28	25	3
24	SDN Oro-Oro Ombo 01	1	28	25	3
25	SDN Oro-Oro Ombo 02	2	56	50	6
26	SDN Oro-Oro Ombo 03	1	28	25	3
KECAMATAN BUMIAJI					
27	SDN Tulungrejo 01	2	56	50	6
28	SDN Tulungrejo 02	1	28	25	3
29	SDN Tulungrejo 03	3	84	75	9
30	SDN Tulungrejo 04	2	56	50	6
31	SDN Tulungrejo 05	1	28	25	3
32	SDN Sumbergondo 01	1	28	25	3
33	SDN Sumbergondo 02	1	28	25	3
34	SDN Punten 01	3	84	75	9
35	SDN Punten 02	1	28	25	3
36	SDN Bulukerto 01	1	28	25	3
37	SDN Bulukerto 02	1	28	25	3
38	SDN Bulukerto 03	1	28	25	3
39	SDN Gunungsari 01	1	28	25	3
40	SDN Gunungsari 02	1	28	25	3
41	SDN Gunungsari 03	1	28	25	3
42	SDN Gunungsari 04	1	28	25	3
43	SDN Bumiaji 01	1	28	25	3
44	SDN Bumiaji 02	1	28	25	3
45	SDN Pandanrejo 01	1	28	25	3
46	SDN Pandanrejo 02	1	28	25	3
47	SDN Giripurno 01	2	56	50	6
48	SDN Giripurno 02	3	84	75	9
49	SDN Giripurno 03	2	56	50	6
KECAMATAN JUNREJO					
50	SDN Beji 01	2	56	50	6
51	SDN Beji 02	2	56	50	6
52	SDN Torongrejo 01	1	28	25	3
53	SDN Torongrejo 02	1	28	25	3
54	SDN Torongrejo 03	1	28	25	3
55	SDN Mojorejo 01	3	84	75	9
56	SDN Mojorejo 02	2	56	50	6
57	SDN Junrejo 01	2	56	50	6

58	SDN Junrejo 02	2	56	50	6
59	SDN Tlekung 01	1	28	25	3
60	SDN Tlekung 02	1	28	25	3
61	SDN Dadaprejo 01	2	56	50	6
62	SDN Dadaprejo 02	1	28	25	3
63	SDN Pendem 01	3	84	75	9
64	SDN Pendem 02	2	56	50	6

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO